SKRIPSI

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Implementation Of Public Service After The Division Of Selelos Village
Gangga Sub-District North Lombok Districk

Diajukan Sebagai Persyaratan Menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S1)

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Mataram



Disusun Oleh:

217110125

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh:

ROHMI AL ROSI

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi Tanggal 15 Februari 2021

> Menyetujui Pembimbing

Pembimbing I

, Pembimbing II

Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP NIDN. 0822048901

Ilham Zitri, S.IP.,M.IP NIDN. 0817119102

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh:

ROHMI AL ROSI NIM. 217110125

Telah dipertahankan didepan peguji Pada tanggal 15 Februari 2021 Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP NIDN.0822048901

2. <u>Ilham Zitri, S.IP.,M.IP</u> NIDN.0817119102

3. M. Taufik Rachman, S.H.,M.H NIDN.0825078701 Y · · Ketua

Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik

NIDN: 0822048901

Mengetahui, Dekam Pakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

H-Mahammad Ali Ikhsan, M.Si NIDN. 0806066801

III

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 15 Februari 2021

Mahasiswa,

Rohmi Al Rosi 217110125



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM **UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906 Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama : Rohmi Al Roen
NIM : 217(10125
NIM : 217/10/25 Tempat/Tgl Lahir: Den Banglet, OG April 1989
Program Studi . Adm. Rublik .
Fakultas Figipol No. Hp/Email : 081,717,242,818 / rohimialros 58 Agmail com
No Hn/Fmail : 081717 242818 / rohmialros: 58 Qamail .com
Judul Penelitian:
Judui Peneiman :-
Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Selelos
Kecamatan Gangga KLU
Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34 &
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian
tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.
Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
Dibuat di : Mataram
Pada tanggal: 1 Februari 2021
Mengetahui,
Penulis Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT
CASTAHF933425359
COO CAN AND REPARK
Rohmi Al Rom. Islandar, S.Sos., M.A.
MIN 0802048904



UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906 Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram,	saya yang bertanda tangan di
bawah ini:	
Nama · Pohmi Al Rosi	
NIM : 21711012¢	
Tempat/Tgl Lahir: Den. Bangket, 06 April 1999	
Program Studi : Adm. Publik	
Fakultas : Figipol	
No. Hp/Email : 081717, 242818 / rohmatrosi 58 @ grand	.com
Jenis Penelitian : ☑Skripsi □KTI □	
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, me UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak	
	ase), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lai	
perlu meminta ijin dari saya selama <i>tetap mencantumkan nama</i>	
sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekar	an Desa Selelos
Kecamatan Gangga KLU	
Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cip	ta dalam karya ilmiah ini menjadi
tanggungjawab saya pribadi.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya ta	npa ada unsur paksaan dari pihak
manapun.	
Dibuat di : Mataram	
Pada tanggal: 11 Februari 2021	•
Me	ngetahui,
Penulis Ke	pala UPT. Perpustakaan UMMAT
MOTERAL AND	WANAD
TEMPEL	
BACDFAHF93346360	
6000 ENAMPBURUPIAH	
Rohmi Al Rosin	andar, S.Sos., M.A.
	DN 0802048904

Karya ilmiah ini kupersembahkan khusus untuk kedua orang tuaku, seluruh keluargaku, dan orang-orang tercinta di sekelilingku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.
- 2. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswwanto, S.T., MM dan Wakil Dekan 2 Bapak Amin Saleh, S.Sos., M. Si.
- 3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus selaku Dosen Pembimbing I.
- 4. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus selaku Dosen Penguji.
- 5. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 6. Yang penulis cintai yaitu kedua orang tua (Bapak Mahar Marjono dan Ibu Rusniati) serta Ibu Sambung penulis (Ibu Rusniati) yang sudah berusaha dengan susah payah dalam mendukung saya memberikan motivasi yang tiada henti.
- 7. Semua pihak yang ikut terlibat dalam membantu saya dalam penyusunan Skripsi ini.

Mataram, 15 Februari 2021

Rohmi Al Rosi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah membeikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyusun proposal dengan judul "Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara". Penyusunan proposal skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lain berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang tanpa adanya dukungan, materi dan motivasi dari mereka, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah secara maksimal memberikan doa dan dukungan, serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama.
- 4. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

5. Orang tua saya Bapak Mahar Marjono dan Ibu Murniati yang telah

mendukung dan mendoakan saya.

6. Teman-teman seperjuangan saya Kelas B Administrasi Publik Angkatan

2017 yang telah memberikan semangat agar saya bisa menyelesaikan

proposal skripsi ini tepat waktu.

7. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan proposal penelitian ini,

baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik

dari segi bahasa, penulisan dan materinya. Sehingga apabila terdapat kesalahan

dalam penulisan proposal ini penulis mohon dimaafkan serta kritik dan sarang

yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam hal tersebut, semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan

dan semoga dapat dijadikan sebagai referensi.

Mataram, 25 Januari 2021

ROHMI AL ROSI NIM. 217110125

ix

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN

DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Rohmi Al Rosi¹, Rahmad Hidayat², Ilham Zitri³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dan merata yang diberikan oleh Pemerintah Desa pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sebelumnya, Desa Selelos tergabung dalam Desa Bentek yang memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup luas, sehingga menyebabkan pemberian pelayanan yang tidak merata oleh Pemerintah Desa Bentek. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan di beberapa kalangan masyarakat, karena terlalu banyak dan panjangnya antrean masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Desa Bentek. Bukan itu saja, masyarakat Desa Selelos juga mengingingkan pelayanan yang mudah dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga mereka sangat antusias dalam menyambut pemekaran desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kantor Desa Selelos Kecamatan Gangga. Penelitian ini memperoleh data primer dari proses wawancara dan data sekundernya diperoleh dari observasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos terbilang berhasil karena pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selelos berjalan maksimal jika dilihat dari 4 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan dan daya tanggap. Keempat indikator ini dapat dilihat dari tujuan pemekaran Desa Selelos yang berhasil membawa perubahan pada pelayanannya. Pelayanan yang diberikan pastinya lebih mudah dan berbeda dengan pelayanan yang masyarakat terima sebelumnya saat masih tergabung dalam Desa Bentek, pelayanan dengan jarak tempuh yang dekat dengan pemukiman warga, pelayanan yang merata ke setiap lapisan masyarakat, serta daya tanggap dari perangkat kerja Desa Selelos yang tinggi yang menjadikan pelayanan di Kantor Desa Selelos mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun, ada juga beberapa perangkat kerja Desa Selelos yang masih belum bisa mengoperasikan komputer.

Kata kunci : pelaksanaan, pelayanan publik, pemekaran desa.

PUBLIC SERVICE IMPLEMENTATION POST DEVELOPMENT VILLAGE SELELOS KECAMATAN GANGGA NORTH LOMBOK DISTRICT

Rohmi Al Rosi¹, Rahmad Hidayat², Ilham Zitri³
Student¹, Supervisor², Main Supervisor³
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The expansion of Selelos Village, Gangga District, North Lombok Regency was motivated by the community's demands who wanted better and more equitable services provided by the Village Government in particular and the Regional Government in general. Therefore, the government as a service provider is required to provide optimal service to the community. Previously, Selelos Village was a part of the Bentek Village, which had a wide working area, resulted in unequal service delivery by the Bentek Village Government. This act caused jealousy in some community circles because there were too many and long queues of people who needed services at the Bentek Village Office. Also, Selelos Village people want accessible services at a distance that is not too far from where they live. So they are very enthusiastic about welcoming the expansion of the village.

This study used a qualitative method and the Selelos Village Office's research location, Gangga District. This study obtained primary data from the interview process and secondary data obtained from observation and documentation.

After the division of Selelos Village, public services' implementation is considered successful because its implementation runs optimally when viewed from 4 indicators: effectiveness, efficiency, justice, and responsiveness. These four indicators can be seen from Selelos Village's expansion, which has succeeded in bringing about changes in its services. The services provided are certainly more accessible and separate from the community's services before when they were members of Bentek Village, services that are close to residential areas. The benefits are evenly distributed to every level of society and the high responsiveness of the work apparatus of Selelos Village. Making services at the Selelos Village Office get a positive response from the community. However, several Selelos Village work units still cannot operate computers.

Keywords: implementation, public services, post-expansion

MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA BATARAM KEPALA UPT P3B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
UCAP <mark>AN TERIMAKASIH</mark>	viii
ABSTRAK	ix
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Yang Relevan	6

2.2 Tinjauan	10
2.2.1 Definisi Pemekaran	10
2.2.2 Tujuan Pemekaran Desa`	10
2.2.3 Syarat-Syarat Pemekaran Desa	11
2.2.4 Dampak Positif dan Negatif Pemekaran Desa	12
2.2.5 Definisi Pelayanan Publik	12
2.2.6 Indikator Pelayanan Publik	13
2.2.7 Asas-Asas Pelayanan Masyarakat	14
2.2.8 Tujuan Pelayanan Masyarakat	15
2.2.9 Bentuk-Bentuk Pelayanan Masyarakat	15
2.3 Kerangka Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	. 19
3.3 Sumber Data	. 19
3.3.1 Data Primer	. 20
3.3.2 Data Sekunder	. 20
3.4 Pemilihan Informan	. 21
3.5 Metode Pengumpulan Data	. 21
1. Observasi	. 21
2. Wawancara	. 21
3. Dokumentasi	. 22
3 6 Metode Analisis Data	22

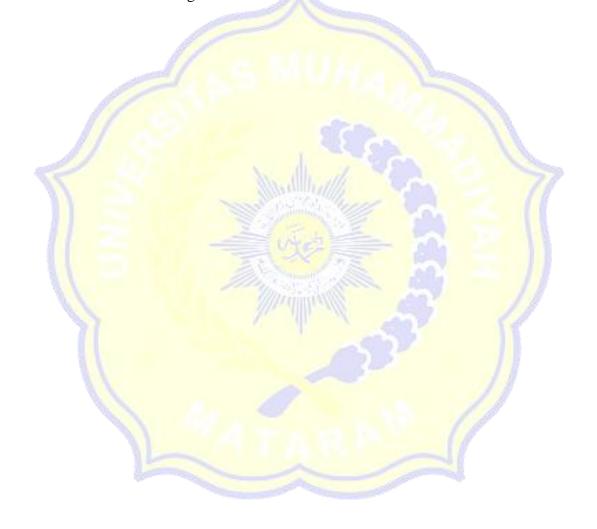
3.7 Uji Keabsahan Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Selelos	27
4.1.2 Letak Geografis Desa Selelos	28
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Selelos	30
4.1.4 Sarana dan Prasarana Kantor Desa Selelos	31
4.1.5 Pemerintahan Desa Selelos	32
4.1.6 Visi dan Misi Desa Selelos	36
4.1.7 Kependudukan	37
4.2 Pembahasan	45
1. Efektivitas	50
2. Efisiensi	54
3. Keadilan	57
4. Daya Tanggap	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
I AMPIRANJI AMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Sumber Data Primer	20
Tabel 3.2 Daftar Yang Akan Diwawancara	22
Tabel 4.1 Daftar Nama Dusun dan RT	28
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Selelos	31
Tabel 4.3 Struktur Pemerintah Desa Selelos	
Tabel 4.4 Data BPD Selelos	
Tabel 4.5 Data LPM Desa Selelos	36
Table 4.6 Data Panitia Pembangunan Desa Selelos	36
Tabel <mark>4.7</mark> Data Penduduk Menurut W <mark>ilayah</mark>	37
Tabel 4.8 Data Penduduk Menurut Agama	38
Tabel 4.9 Data Penduduk Menurut Pekerjaan	
Tabel 4.10 Data Penduduk Menurut Pendidikan	41
Table 4.11 Data Potensi Ekonomi Desa Selelos	43
Table 4.12 Data <mark>Sarana Kesehatan Di Desa Selelos</mark>	. 44
Tabel 4.13 Data Kaur Kantor Desa Selelos	52
Table 4.14 Perbedaan Kantor Desa Bentek dan Selelos	52
Table 4.14 Masyarakat Yang Datang Mengurus Pessyaratan Surat	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	. 17
Gambar 3.1 Metode Analisi Data	. 24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Selelos	30





BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks sosial sering muncul paradigma baru dalam masyarakat mengenai organisasi pelayanan publik yang pada dasarnya berasal dari tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dimata hukum tanpa memandang status sosial mereka, dan pemerintah-lah yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas setiap barang dan jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal tersebut diatas, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah. Karena pada hakekatnya, pemerintah memang sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat semenjak diterbitkannya UU Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik menurut khalayak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien. Karena pelayanan publik dikatakan efektif dan efisien apabila masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah dan sesungguhnya kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh sebuah instansi pemerintah.

Disamping itu juga, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memberikan pelayanan yang merata dan transparan bagi masyarakat Lombok Utara pada khususnya. Kemudian, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang menuntut masyarakat untuk lebih antusias dalam berkreativitas dan berinovatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi salah satu faktor utama masyarakat Desa Selelos menginginkan terjadinya pemekaran desa, karena mereka sangat menginginkan pelayanan yang merata yang diberikan oleh Pemerintah Desa pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya. Keluhan dan tuntutan masyarakat mengenai pelayanan ini disampaikan kepada Kepala Desa melalui perwakilan dari masing-masing Dusun yang ada di Desa Selelos.

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi publik (Sedarmayanti, 2010). Oleh karena itu, bagi masyarakat yang merasa cemburu akan adanya pelayanan yang tidak merata, maka mereka menginginkan pemerataan pelayanan tersebut melalui adanya pemekaran Desa

Selelos. Dalam hal pemberian pelayanan, tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, namun juga harus memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang diberikan oleh pemberi pelayanan melalui beberapa indikator.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33 ayat (1) huruf a, bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Oleh sebab itu, pemekaran merupakan pemecahan, pembagian, pemisahan suatu wilayah yang menjadi dua atau lebih bagian baru yang sebelumnya tergabung dalam satu kesatuan wilayah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Desa Selelos tergabung dalam Desa Induk yaitu Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup luas, sehingga menyebabkan pemberian pelayanan yang tidak merata oleh Pemerintah Desa Bentek. Sehingga menimbulkan kecemburuan di beberapa kalangan masyarakat, karena terlalu banyak dan panjangnya antrean masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Desa Bentek. Misalnya, masyarakat Desa Selelos yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari desanya untuk menuju ke Kantor Desa Bentek untuk mendapatkan pelayanan, namun setelah sampai disana sudah jam istirahat kantor, sudah banyak masyarakat dari dusun lain, seperti Dusun Dasan Bangket, Dusun San Baro, Dusun Todo yang menunggu mendapatkan pelayanan ataupun pegawainya memiliki kegiatan administrasi lain, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal bahkan mereka tidak mendapatkan pelayanan sama sekali. Oleh karena

itu, masyarakat menuntut adanya pemekaran desa dibandingkan dengan penghapusan dan penggabungan wilayah.

Ada juga beberapa faktor yang menjadi faktor pendorong terjadinya pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yaitu:

- Mengembangkan proses pembelajaran demokrasi masyarakat, dengan melibatkan mereka dalam pembangunan.
- 2. Proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan inovasi masyarakat.
- 3. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara" dengan mengambil studi kasus di Desa Seleos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari proposal ini adalah "Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis dan akademis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu Administrasi Publik dan memberikan konstribusi pada administrasi khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pada sebuah desa setelah dilakukannya pemekaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah desa khususnya tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran desa.
- Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini nanti bisa
 bermanfaat dalam memperkaya bahan referensi ilmiah dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

3. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi, dengan konsentrasi di bidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam upaya mengembangkan ilmu administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

Untuk memudahkan dalam penyusunan tulisan ini, tentu tidak lepas dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam tulisan ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan tulisan ini.

Adapun matriks dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan	Judul	Hasil
	Tahun		
1.	Erwin Belly	Efektivitas Pelayanan	Pelayanan publik di Kantor
	Najoan (2018)	Publik Pasca	Kecamatan Kawangkoan
		Pemekaran (Suatu Studi	Utara terbilang belum efektif,
		Di Kecamatan	dengan kata lain responden
		Kawangkoan Utara	dari unsur masyarakat
		Kabupaten Minahasa)	mengakui bahwa pemekaran
			kecamatan kurang berdampak
			bagi peningkatan kualitas
			pelayanan publik jika diukur
			dari beberapa indikator,

			sehingga perlu adanya
			perbaikan kualitas aparatur
			Kantor Kecamatan
			Kawangkoan Utara.
2.	Aidil Putra	Pelaksanaan Pelayanan	Pemekaran Desa Batu Berapit
	(2017)	Masyarakat Desa Batu	berdampak positif dari
		Berapit Kecamatan	beberapa segi, yakni segi
		Jemaja Kabupaten	sarana dan prasarana,
		Kepulauan Anambas	kemudahan akses dan
-		Pasca Pemekaran (Studi	kenya <mark>manan yang d</mark> apat
1		Pada Pelayanan	dilihat dari pelayanan yang
		Kependudukan)	diberikan perangkat Desa
I.		The same of the sa	Batu Berapit lebih terfokus
			dan optimal.
3.	Mega Hardianty	Pelayanan Publik Pasca	Terdapatnya pengaruh yang
	Makaganza	Pemekaran Kecamatan	signifikan antara pemekaran
	(2017)	Di Kecamatan Tahuna	kecamatan dengan
	1	Barat Kabupaten	pembangunan infrastruktur,
		Kepulauan Sangihe	dimana setelah pemekaran,
			pembangunan menjadi lebih
			baik dan cepat karena
			pemerintah menyediakan
			sarana dan prasarana serta

			dana yang dibutuhkan untuk	
			kelancaran pembangunan.	
4.	Annisa Yulianti	Efektivitas Pelayanan Setelah pemekaran terdapa		
	(2017)	Publik Pasca	pengaruh yang signifikan	
		Pemekaran Kecamatan	antara pemekaran kecamatan	
		Samarinda Kota, Di	dan kondisi pembangunan	
		Kota Samarinda.	infrastruktur, dimana setelah	
		EPE MAN	pemekaran pembangunan	
			menjadi lebih baik dan cepat.	
COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE	0		Faktor yang mempengaruhi	
1		Medilledle	kondisi pembangunan dan	
		1,50	pelayanan public dari faktor	
			p <mark>enduk</mark> ung internal yaitu	
1			pemerintah menyediakan	
	71		sarana <mark>prasarana d</mark> an dana	
	1/		yang dibutuhkan baik untuk	
			kelancaran pembangunan	
		TAR	maupun untuk efektivitas	
			pelayanan publik.	
5.	Raras Efriyanti	Kualitas Pelayanan	Pasca pemekaran, kualitas	
	Putri (2016)	Publik Pasca	pelayanan publik dapat	
		Pemekaran Kecamatan	dikatakan belum baik, karena	
		(Studi Di Kecamatan	jika dilihat dari segi	

		Sukarame Band	ar aparaturnya, masih ada
		Lampung)	petugas yang belum
			menguasai tugas pokoknya,
			pembagian tugas yang kurang
			jelas dan dari segi tangible,
			dimana pelayanan yang
			diberikan berupa saranan fisik
		ER MA	seperti komputerisasi
			administrasi, ruang tunggu,
			dll belum memadai.
6.	Faisal Yusni	Kesejahteraan	Setelah pemekaran,
	Huda (2014)	Masyarakat Pas	ca kesejahteraan masyarakat
		Pemekaran Desa (Stu	di <mark>Desa Sumber Brant</mark> as
1		Pada Desa Sumb	er mengalami peningkatan, juga
	71	Brantas, Kota Batu)	jumlah <mark>keluarga</mark> sejahtera
			meningkat yang dipengaruhi
			oleh aktivitas ekonomi warga
		TATA	setelah infrastruktur jalan
			yang membaik dan layanan
			publik yang lebih dekat.

Sumber data : jurnal-jurnal nasional

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Definisi Pemekaran

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 33 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Dengan demikian, daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian yang baru untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan pada pembagian-pembagian yang objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusianya serta sarana prasarana penunjang lainnya.

2.2.2 Tujuan Pemekaran Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan NKRI. Sedangkan menurut Peraturan Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan criteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah pada pasal 2 menyebutkan bahwa pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1. Percepatan pelayanan masyarakat.
- 2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokratis.
- 3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.
- 4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
- 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- 6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2.2.3 Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, dalam pembentukan daerah baru, setiap daerah harus mampu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Syarat Administratif

Syarat administrasi meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

2. Syarat Teknis

Syarat Teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial, budaya, pertahanan, keamanan serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3. Syarat Fisik Kewilayahan

Syarat fisik kewilayahan berhubungan dengan wilayah yang akan dimekarkan, lokasi calon ibu kota serta sarana dan prasarana pemerintahan.

2.2.4 Dampak Positif dan Negatif Pemekaran Desa

Menurut Yosephus (2014) dampak positif dan negatif pemekatan desa antara lain :

Dampak positif pemekaran desa, sebagai berikut :

- 1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- 3. Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
- 4. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Sedangkan dampak negatif yang muncul dari pemekaran desa yakni:

- Kurangnya tenaga kerja ahli untuk memberikan kontribusi kepada desa yang belum mapan.
- 2. Menimbulkan diskriminasi terhadap daerah yang dinilai secara sosial masyarakat.

2.2.5 Definisi Pelayanan Publik

Sedarmayanti (2010), pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Jadi, pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, dan

BUMD dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi, pelayanan masyarakat merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau pemberi pelayanan sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.

2.2.6 Indikator Pelayanan Publik

Sedarmayanti (2010) mengungkapkan terdapat beberapa kriteria untuk bisa dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Efektivitas

Tujuan didirikanya organisasi pelayanan publik tersebut akan dapat tercapai bila dikaitkan erat dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

b. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan dijawab melalui kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagan diri daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap.

2.2.7 Asas-Asas Pelayanan Publik

Adapun asas-asas pelayanan public menurut Sinambela dkk (2011) dalam Kurniawan, antara lain :

1. Transparan

Terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam artian tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi.

2.2.8 Tujuan Pelayanan Publik

Pada umumnya, untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat dibutuhkan kualitas pelayanan yang memadai dan sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan pelayanan masyarakat yang ingin dicapai yaitu memuaskan dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kualitas dan mutu pelayanan merupakan kesesuaian antara harapan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi masyarakat serta antara keinginan masyarakat dan kenyataan yang diterima masyarakat.

2.2.9 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik

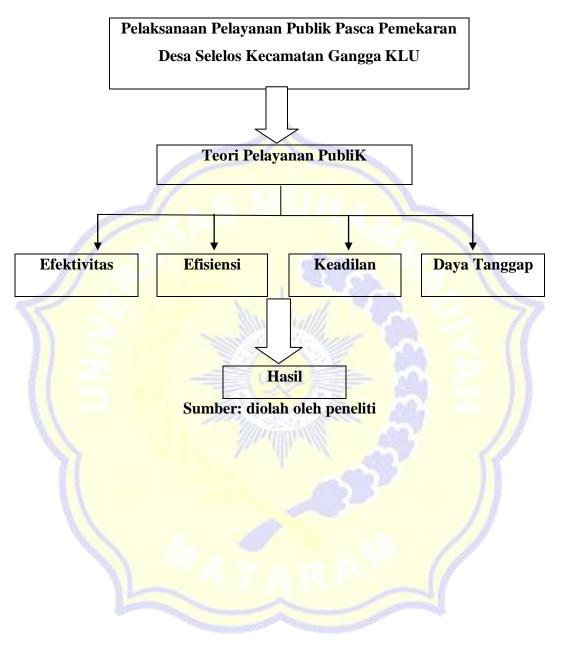
Adapun bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang terkandung dalam Kemenpan No. 63 Tahun 2003 dibagi menjadi 3 kelompok, yakni :

- 1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap sesuatu, dll.
- 2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dll.
- 3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dll.

2.3 Kerangka Berpikir

Alur pemikiran penelitian merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menemukan hasil penelitian. Adapun penelitian ini memiliki alur pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015). Metode kualitatif ini dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan makna atau pemahamannya yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.

Dalam buku lain juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metodelogi penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Siyoto, 2015). Metode kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos yang merupakan salah satu desa yang telah melakukan pemekaran di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok

Utara. Pada akhirnya akan dilakukan analisis terhadap data dan fenomena yang diperoleh di lapangan, agar dapat disajikan pada laporan akhir penelitian. Hasil akhir penelitian sangat bergantung pada perkembangan di lapangan, yang didasarkan pada kemampuan peneliti untuk menggali dan mengelola berbagai masukan yang diperoleh dalam penelitian lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan pada Bulan Januari 2021.

3.3 Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling merupakan penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian atau ciri-ciri khusus tertentu (Seran, 2018). Purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu mengenai objek penelitin atau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Sedangkan snowball sampling merupakan metode penentuan sampel dengan teknik yang menyerupai jaringan laba-laba (Seran, 2018). Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwasanya teknik snowball sampling ini memberikan lebih banyak sampel kepada peneliti, yang mulanya hanya satu atau beberapa orang sebagai sampel, tetapi kemudian berkembang menjadi banyak orang karena rekomendasi dari orang-orang sebelumnya yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang objek penelitian.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dari lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2017 dalam Susanto). Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga KLU ini, maka sumber data primernya ialah masyarakat Desa Selelos yang merasakan secara langsung pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa Selelos.

Tabel 3.1
Sumber Data Primer

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Selelos	1
2.	Sekertaris Desa	1
3.	Staf Kantor Desa Selelos	2
4.	Kasi Pelayanan	31
5.	Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Selelos	6
Jumlah		11

Sumber: diolah oleh peneliti

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2017 dalam Susanto). Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga KLU ini, maka sumber data

sekundernya yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku yang terkait dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini.

3.4 Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, pihak yang dijadikan informan adalah mereka yang dianggap mempunyai atau lebih mengetahui informasi tentang subjek penelitian. Cara yang digunakan dalam menentukan informan tersebut adalah dengan purposive sampling dan snowball sampling. Dua metode itu digunakan karena nantinya penulis tidak tahu, informan yang mulanya sudah ditentukan jumlahnya akan bertambah sesuai dengan rekomendasi dari informan sebelumnya, karena dianggap lebih mengetahui secara benar mengenai subjek penelitian. Penentuan jumlah informan penelitian berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam skripsi ini, metode pengumpulan datanya menggunakan tiga teknik, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan data dalam penelitian, dimana peneliti atau pengamat mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang menjurus kepada objek penelitian guna mendapatkan informasi yang akurat.

Tabel 3.2

Daftar Yang Akan Diwawancara

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Selelos	1
2.	Sekertaris Desa	1
3.	Staf Kantor Desa Selelos	2
4.	Kasi Pelayanan	1
5.	Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Selelos	6
Jumlah		11

Sumber: diolah oleh peneliti

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka serta gambar yang berupa laporan dan keterangan yang bisa digunakan sebagai pendukung penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Adapun analisi data dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Data Collection (pengumpulan data)

Mengumpulkan data dari informan hingga mendapatkan jawaban yang dibutuhkan, jika jawaban belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga data dianggap kredibel.

2. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola tertentu.

3. Data Display (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat (teks yang bersifat naratif), tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya.

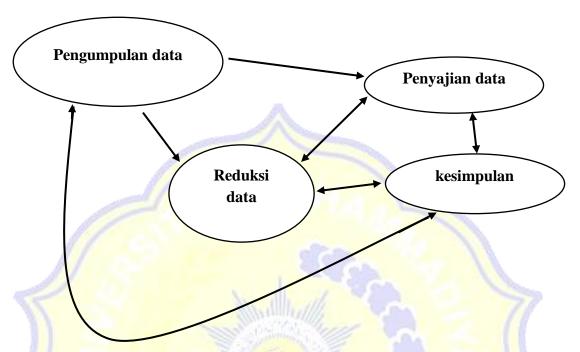
4. Conclusion Drawing Verification (penarikan kesimpulan)

Setelah mereduksi dan menyajikan data, maka akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang hingga setelah diteliti menjadi jelas.

Secara skematis, alur analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Metode Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang saling menjalin pada saat sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam gambar diatas, tiga jenis analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama peneliti melakukan penulisan dan tinjauan ulang pada catatan lapangan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,kekokohannya, dan kecocokannya.

3.7 Uji Keabsahan Data

Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah "data yang tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Penelitian kualitatif yaitu data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan denga apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji kredibilitas data kualitatif karena peneliti merasa uji kredibilitas data dengan metode kualitatif ini sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Kredibilitas data menurut Sugiyono (2012) dalam Alfy Rizki (2014) menegaskan sebagaimana bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas data kualitatif yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan yaitu untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan memperpanjang observasi berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam untuk mendapatkan kepastian data. Oleh karena itu, peneliti pun juga membaca berbagai referensi dari berbagai sumber. Sumber dan hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan peneliti, dengan demikian pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan kepastian data dan keakuratan data secara sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas data ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.